



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH ( LKIP )  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KECAMATAN BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Bangsalsari. Kinerja Kecamatan Bangsalsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023.

Jember, 7 Februari 2024  
CAMAT BANGSALSARI  
  
**Drs. BASUKIK**  
Penata Tk.I  
NIP. 196706241988031002

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	7
A. RENCANA STRATEGIS .....	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	9
C. PERJANJIAN KINERJA .....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	14
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022 .....	14
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	15
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	30
BAB IV. PENUTUP. ....	33
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Perubahan (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD 2023</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Bangsalsari tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari Yang Baik.

Indikator keberhasilan sasaran ini diukur dari nilai SAKIP. Nilai SAKIP merupakan nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Bangsalsari, dimana evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023 adalah BB (Sangat Baik) dengan nilai sebesar 71,05 (Tujuh puluh satu koma nol lima) Hasil tersebut menunjukkan capaian yang sangat memuaskan karena telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

*Sasaran 2* : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan,.

Realisasi sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di

Kecamatan Bangsalsari adalah 85,08 % dengan Capaian Kinerja 100,09%, dan termasuk kategori Sangat Memuaskan.

*Sasaran 3* : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan, Indikator keberhasilan sasaran ini diukur dengan cara menghitung Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di kecamatan Bangsalsari tahun 2023, telah dilaksanakan , Capaian kinerja sasaran yang ketiga ini menunjukkan capaian kinerja sasaran 100 %, capaian kinerja sasaran melebihi target yang ditentukan karena selain beberapa kegiatan fasilitas yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, antara lain: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

*Sasaran 4* : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.

Indikator keberhasilan Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat. Sebanyak 100% laporan pengaduan terselesaikan sesuai SOP penanganan pengaduan, sehingga Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat. Capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2023 yaitu 100% menunjukkan capaian yang sangat memuaskan.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Bangsalsari telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 (empat) indikator capaian diatas, seluruhnya mencapai kategori Sangat Memuaskan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 98,09% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 4.042.513.947 dan Belanja Modal sebesar 1,91% atau sebesar Rp. 78.675.100.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.881.767.126 atau 94,19% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Pengendalian capaian secara berkala belum dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi SAKIP
2. Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
3. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik dalam hal tidak memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, seperti sinyal akses internet lemah dan perangkat Komputer yang kurang memenuhi standar
5. Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
6. proses pemungutan PBB-P2 itu sendiri yang masih mengalami banyak kendala juga karena kurangnya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak oleh petugas pajak itu sendiri yang mengakibatkan masyarakat wajib pajak di kecamatan masih menyepelekan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
2. Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan

Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di Kecamatan Bangsalsari.

4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Bangsalsari yang masih belum memadai dengan menambah jaringan internet dan kuota internet khusus untuk pelayanan dan meng upgrade semua perangkat computer pada tahun 2023 sudah mengadakan 2 unit PC dan di tahun 2024 akan ada pengadaan lagi 1 unit PC untuk Operator KTP, dan untuk kebutuhan Internet pada tahun 2023 sudah tambah 1 set Wifi Icon Net.
5. Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
6. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
7. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
8. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Berkaitan dengan keberhasilan Capaian Sasaran Strategis tersebut, dapat disampaikan pula beberapa capaian di wilayah kerja Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2023 diantaranya :

1. Target Kinerja peningkatan status 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Bangsalsari dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri sebanyak 5 (lima) Desa dari 11 (sebelas) Desa ;
2. Peningkatan Status Akreditasi tiga Puskesmas Bangsalsari dan Sukorejo dari Dasar menjadi Status akreditasi Paripurna , status Akreditasi Puskesmas Bangsalsari dari Madya menjadi Status Akreditasi Paripurna;
3. 3 (tiga) Desa dari 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Bangsalsari menjadi Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) pada tahun 2023

4. Pengembangan Desa wisata di Kecamatan Bangsalsari dari 11 (sebelas) Desa ada 6 (enam) Desa yang cukup signifikan dalam pengembangan Desa wisata antara lain : Desa Badean dengan wisata alam Puncak Badean; Desa Tugusari dengan wisata alam dan wahana kolam renang Umbul Pelangi; Desa Sukorejo dengan wisata alam dan UMKM berupa warung – warung makan, kopi dll. Dengan nama wisata Kanal Suko-Suko., Desa Bangsalsari dengan wisata Swimming Pool Bambu Kuning., Desa Langkap dengan wisata kolam renang Valerie, Desa Gambirono dengan wisata Zona Tirta Aquatic Sport.
5. Berkembangnya Sentra Industri yang mendorong perekonomian di wilayah Kecamatan Bangsalsari antara lain : Industri pembuatan sepatu kulit di Desa Petung; Industri pembuatan krupuk kuli / rambak di Desa Sukorejo; Industri pembuatan aksesoris tasbih, gelang, kalung dll dari bahan kayu di Desa Sukorejo; Industri pembibitan Tanaman Buah buahan, dan tanaman lainnya di Desa Karangsono; Industri pembibitan Ikan di Desa Karangsono; Industri pembuatan aksesoris tasbih, gelang, kalung dll dari bahan kayu di Desa Karangsono;

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bangsalsari dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Bangsalsari

Kinerja Kecamatan Bangsalsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Bangsalsari tahun 2023

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Bangsalsari dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Bangsalsari adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Bangsalsari
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Bangsalsari dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bangsalsari dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BANGSALSARI**

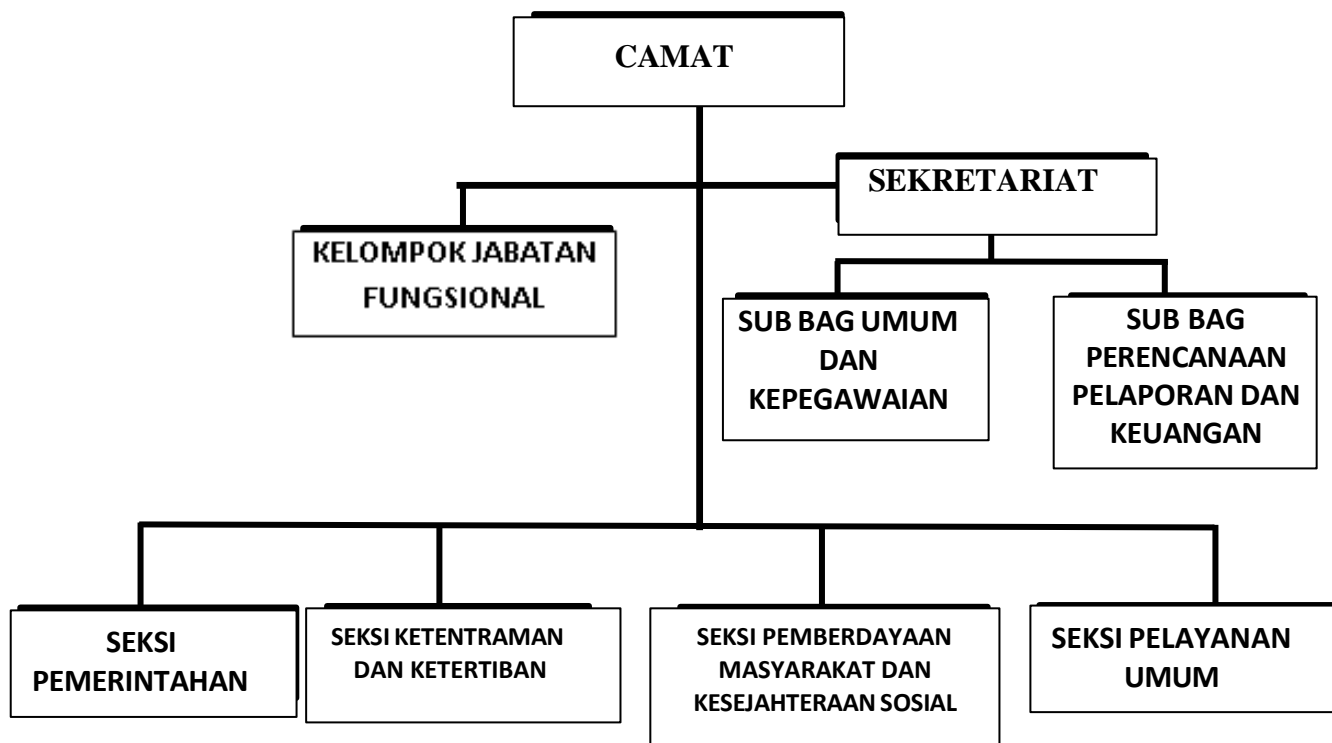
Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Bangsalsari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Bangsalsari merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Bangsalsari dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan Bangsalsari mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Kecamatan Bangsalsari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi kegiatan Desa
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Bangsalsari terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawai :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawian; dan
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Desa / Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



#### D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BANGSALSARI

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, **Kecamatan Bangsalsari** terdiri dari 16 ASN dan 15 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada **Kecamatan Bangsalsari** :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Kecamatan Bangsalsari**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekretaris Camat	1	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	
4	Pengolah Data dan Informasi	1	

5	Pengadministrasi Perkantoran	1	
6	<b>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan</b>	1	
7	Penelaah Teknis Kebijakan	1	
8	Pengolah Data dan Informasi	0	
9	Pengadministrasi Perkantoran	1	
10	<b>Kepala Seksi Pemerintahan</b>	1	
11	Pengolah Data dan Informasi	0	
12	Pengadministrasi Perkantoran	2	
13	<b>Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	1	
14	Pengolah Data dan Informasi	0	
15	Pengadministrasi Perkantoran	0	
16	Pranata Kelola Keamanan dan Ketertiban	0	
17	<b>Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</b>	1	
18	Pengolah Data dan Informasi	0	
19	Pengadministrasi Perkantoran	1	
20	<b>Kepala Seksi Pelayanan Umum</b>	1	
21	Pengolah Data dan Informasi	1	
22	Pengadministrasi Perkantoran	0	
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Kecamatan Bangsalsari**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Penata Tingkat I	III/d	5
2	Penata	III/c	1
3	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
4	Penata Muda	III/a	2
5	Pengatur Tingkat I	II/d	4

6	Pengatur	II/c	2
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
8	Pengatur Muda	II/a	-
9	Juru Tingkat I	I/d	-
10	Juru	I/c	-
11	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
	<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN**  
**Kecamatan Bangsalsari**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	6	ASN
4	D3	-	ASN
5	S1	8	ASN
6	S2	2	ASN
7	SD	-	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	9	Non ASN
10	D3	-	Non ASN
11	S1	6	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>ASN / NON ASN</b>

## E. PROFIL KECAMATAN

Kecamatan Bangsalsari terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Barat dengan luas wilayah Luas wilayah Kecamatan Bangsalsari adalah berkisar  $\pm$  166,78 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Pegunungan Argopuro;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wilayah Kecamatan Rambipuji;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kecamatan Balung;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wilayah Kecamatan Tanggul.

Jumlah penduduk di Kecamatan Bangsalsari sebanyak 124.264 jiwa penduduk laki laki, dan sebanyak 61.944 Jiwa dengan persentase 49,85% penduduk perempuan 62.320 Jiwa dengan persentase 50,15%. penduduk Kecamatan

Bangsalsari memiliki mata pencaharian antara lain :

1. Bidang pertanian 14,32 % sebanyak 18.100 jiwa
2. Bidang pengangguran 24,41 % sebanyak 30.849 jiwa
3. Bidang wiraswasta 20,35 % sebanyak 25.714 jiwa
4. Bidang pelajar 13,45 % sebanyak 16.998 jiwa
5. Bidang Ibu rumah tangga 14,85 % sebanyak 18.763 jiwa
6. Bidang buruh tani 6,60 % sebanyak 8.347 jiwa
7. Bidang karyawan swasta 1,37 % sebanyak 1.726 jiwa
8. Bidang perdagangan 1,03 % sebanyak 1.307 jiwa
9. Bidang buruh harian 0,79 % sebanyak 997 jiwa
10. Bidang PNS 0,32 % sebanyak 408 jiwa
11. Bidang Nelayan 0,01 % sebanyak 18 jiwa
12. Bidang lainnya 2,50 % sebanyak 3.162 jiwa

Secara administratif, Kecamatan Bangsalsari membawahi 11 desa yaitu:

1. Desa Bangsalsari
2. Desa Sukorejo
3. Desa Karangsono
4. Desa Gambirano
5. Desa Curahkalong
6. Desa Langkap
7. Desa Tisnogambar
8. Desa Petung
9. Desa Tugusari
10. Desa Banjarsari
11. Desa Badean

*Sumber Data : Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka (BPS)*

## **F. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Bangsalsari, yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah

dan kompetensinya;

2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Bangsalsari merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 1 yaitu

1) Misi ke- : 2

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

2) Tujuan ke- : 2

Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan

3) Sasaran Strategis Kabupaten : 4

a. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan.

- b. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan.
- c. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan
- d. Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari yang Baik

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan **Kecamatan Bangsalsari** sebagaimana termuat didalam rencana Strategis **Kecamatan Bangsalsari** Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS  
(KECAMATAN BANGSALSARI) TAHUN 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan								
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	3,00				
			SKM Aparatur	95				
			Nilai SAKIP	B				
		Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan	100%				

		dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Retribusi					
		Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	100%				
Sesudah Perubahan Renstra								
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP Bangsalsari		B	B	B	BB
		Meningkatnya Efektifitas Pencaipaan Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai		100 %	100%	100 %	100 %
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok

	penyelenggara an pemerin tahan dan pelayanan publi k.		si dan Tata Laksana Pemerint ah Daerah					
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasa n Masyarak at		85 (Nilai IKM)	85 (Nilai IKM)	90 (Nilai IKM)	90 (Nilai IKM)
		Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persenta se Fasilitasi Kesejaht eraan masyara kat yang dilaksana kan		80%	80%	85%	85%
1		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persenta se Tingkat Penyeles aian Laporan dan		85%	85%	90%	90%

			Pelanggan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat				
--	--	--	---	--	--	--	--

Sumber data :

- tabel 4.1 pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bangsalsari tahun 2021-2026
- TC.25 pada renstra perubahan Kecamatan Bangsalsari tahun 2021-2026

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Bangsalsari Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Bangsalsari adalah sebagai berikut :

## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

### RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

### RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase realisasi anggaran	85%				

efisien.											
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	12 Laporan	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 org/bln	2.116.048.547
								Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	14 Dokumen	234.090.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	256.785.700

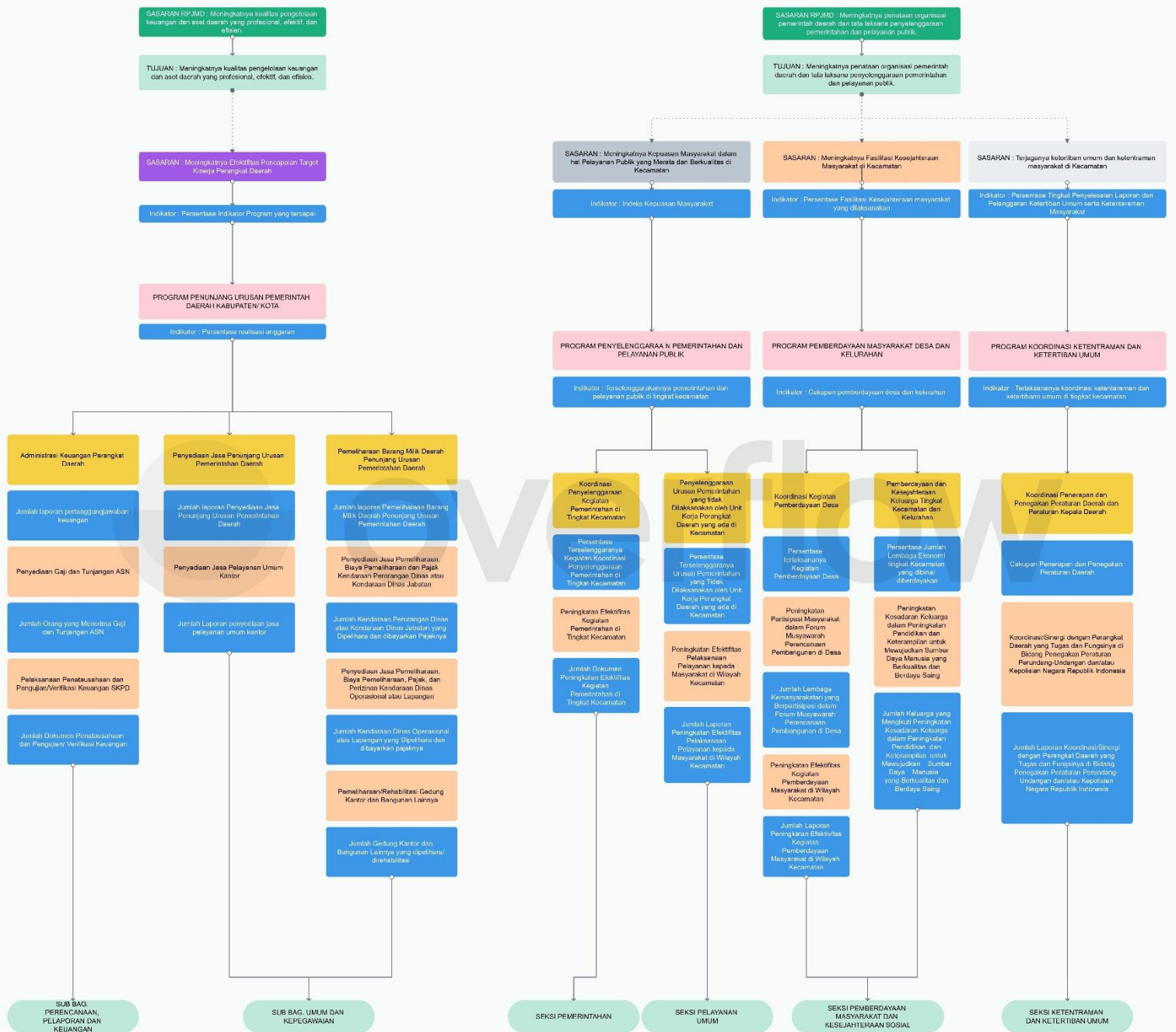
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	38.500.000
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	21.500.000

								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	39.770.000
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Nilai IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	85%				
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 %	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dok	1.017.116.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	90%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	21.633.800

					n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kecamatan	Wilayah Kecamatan		
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	80%				
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	80%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lemb./Desa	8.375.000
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.000.000
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat	Persentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat	80%	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	36 Keluarga	23.400.000

					Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan yang dibina/diberdayakan		Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	85%	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	85%				
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	85%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	13 Laporan	337.970.000

								Undang dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perundang- Undang dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



**Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Bangsalsari Nomor 17 Tahun 2023;

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KECAMATAN BANGSALSARI

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

<b>NO.</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN</b>	<b>BIDANG PENANGGUNGJAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai.  _____ x 100% Jumlah indikator program	Sekcam	LAKIP

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021-2026, yaitu:

- **NON RUTIN**

- **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- **Sasaran**

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- **RUTIN :**

- **Tujuan**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

- **Sasaran**

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja **Kecamatan Bangsalsari** tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan **Kecamatan Bangsalsari** tahun 2021-2026

#### PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN BANGSALSARI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bangsalsari	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Kertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Ma-syarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Me-rata dan Berku-alitas di Keca-matan Bangsalsari	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Bangsalsari	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	100%
4	Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari yang Baik	Nilai SAKIP	B

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka **Kecamatan Bangsalsari** didukung dengan anggaran program tahun 2023 sebesar Rp. 4.121.189.047 ( Empat Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Tujuh )

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Bangsalsari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Bangsalsari menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja

sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BANGSALSARI**

### **B.1 ANALISA REALISASI KINERJA**

Kecamatan Bangsalsari telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bangsalsari tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 4 sasaran dan 4 indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari yang Baik	Nilai SAKIP	70	71,05	101,5%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,08	100,1%
3	Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bangsalsari	Persentase Penyelesaian Laporan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%
Ra ta Rata Capaian					103,59%

Sumber Data:

1. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD s.d Triwulan 4 (Aplikasi SIPPD)
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi Sukma-e Jatim
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP)
4. Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026 Tabel TC 25

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 4 indikator sasaran Kecamatan Bangsalsari rata rata mencapai 103,59 % dan masuk dalam kategori

**Sangat Memuaskan** Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Bangsalsari telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pemerintahan Umum, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari yang Baik	Nilai SAKIP	<b>70</b>	70	70	30,46	65,00	71,05
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80%	85%	.....	82.27%	85,08%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang	-	100%	100%	.....	100%	100%

4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	100 %	100%	.....	100 %	100 %
---	--	--	---	-------	------	-------	-------	-------

Sumber Data:

1. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD s.d Triwulan 4 (Aplikasi SIPPD)
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi Sukma-e Jatim
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP)
4. Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari yang Baik	Nilai SAKIP	80	71,05	88,81
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	85,08	94,53
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%

4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%
---	--	--	------	------	------

*Sumber Data:*

1. *Evaluasi Terhadap Hasil RKPD s.d Triwulan 4 (Aplikasi SIPPD)*
2. *Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi Sukma-e Jatim*
3. *Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP)*
4. *Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026 Tabel TC. 25*

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari yang Baik	Nilai SAKIP	71,05	B / 63,36 (Angka rata rata nasional)	
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,08		

3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%		
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%		

*Sumber Data:*

1. *Evaluasi Terhadap Hasil RKPD s.d Triwulan 4 (Aplikasi SIPPD)*
2. *Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi Sukma-e Jatim*
3. *Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP)*
4. *Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026*

Keterangan : Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional dari 4 (empat) indikator tidak diisi secara nasional dikarenakan tidak ada realisasi secara nasional.

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1** : Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari Yang Baik.

Indikator keberhasilan sasaran ini diukur dari nilai SAKIP. Nilai SAKIP merupakan nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Bangsalsari, dimana evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bangsal Tahun 2023 adalah 71,05 atau BB (sangat baik) Hasil tersebut menunjukkan capaian yang sangat memuaskan karena telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sebagaimana data tahun 2022 Nilai evaluasi AKIP tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 menunjukkan Peningkatan, sebagaimana pada tabel 3.2. dimana nilai evaluasi Tahun 2022 adalah 65 atau B (Baik) sedangkan tahun 2021 adalah 30,46 atau C (kurang) Nilai evaluasi yang dicapai tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun akhir periode renstra / tahun 2026.

Sedangkan pada tabel 3.3. dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

Pada Renstra tahun 2026 adalah kategori BB sehingga dalam capaian evaluasi SAKIP dengan kategori B pada tahun 2023 menunjukkan tingkat kemajuan yang cukup baik dan diharapkan dapat mengejar target tersebut di akhir periode Renstra

Dari tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa nilai SAKIP Kecamatan Bangsalsari telah melebihi angka rata-rata nasional dari hasil evaluasi AKIP seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu 63,36 dengan kategori B dan capaian Kecamatan Bangsalsari telah melebihi kategori nilai SAKIP Kabupaten dengan kategori B.

**Sasaran Strategis 2** : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan,

Sebagaimana terlihat dari tabel 3.1 Realisasi sasaran Strategis Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Bangsalsari adalah 85,08 % dengan Capaian Kinerja 100,09%, dan termasuk kategori Sangat Memuaskan.

Dibandingkan dengan dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 adalah 100% capaian kinerja tahun 2023 sebesar 85,08% termasuk kategori Memuaskan, sebagaimana terdapat dalam tabel 3.3

Realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan, sebagaimana pada tabel 3.2. terdapat Peningkatan realisasi dari 82,27 % Tahun 2022 dan pada tahun 2023 dengan realisasi 85,08 % .

Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atas pelayanan publik di Kecamatan Bangsalsari dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SUKMA-e. Pemanfaatan pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh umpan balik perbaikan atas pelayanan publik yang dilaksanakan.

Pelayanan kecamatan Bangsalsari sesuai tugas dan fungsinya antara lain pelayanan surat keterangan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan fasilitasi pengelolaan dana desa, pemberian pelatihan, fasilitasi pendistribusian bantuan, pelayanan administrasi pertanahan, Pelayanan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, koordinasi dengan pemerintah desa;

dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan / *benchmark* dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional jawa timur kabupaten terkait indikator ini. Namun realisasi kabupaten menunjukkan hasil SKM sebesar 86,34% dan realisasi IKM Kecamatan Bangsalsari sebesar 85,08%, sehingga capaian kecamatan Bangsalsari termasuk Sangat Memuaskan yaitu sebesar 98,54%

**Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan,

Indikator keberhasilan sasaran ini diukur dengan cara menghitung Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di kecamatan Bangsalsari tahun 2023, yaitu:

- Pelatihan wirausaha bagi kader PKK sebanyak 12 kegiatan
- Penyaluran bansos PKH Tahap II kepada 4.855 KPM
- Penyaluran bansos BPNT PKH (sembako) / Mei kepada 20.255 KPM
- Penyaluran bansos Door to Door kepada 29 KPM
- Penyaluran bansos Sembako ODGJ kepada 29 KPM
- Penyaluran bansos PLKB kepada 2.120 KPM
- Penyaluran bansos El-Nino kepada 406 KPM
- Penyaluran bansos Jaslut PKH kepada 29 KPM
- Verval data bansos sebanyak 28.484 data
- Verval data Bansos Guru ngaji sebanyak 855 data dan Modin 9 data.

Seluruh kegiatan fasilitasi dimaksud telah dilaksanakan , Capaian kinerja sasaran yang ketiga ini menunjukkan capaian kinerja sasaran 100 %, capaian kinerja sasaran melebihi target yang ditentukan karena selain beberapa kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, Kecamatan Bangsalsari juga melaksanakan beberapa tambahan kegiatan fasilitasi kesejahteraan masyarakat antara lain:

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan Tabel 3.2 dan 3.3, dapat disimpulkan bahwa capaian cukup optimal, dimana Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Pada Renstra

tahun 2026 adalah 100 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Sangat Memuaskan , dan mampu mempertahankan capaian kinerja 100 % seperti tahun 2021 dan 2022;

Dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan / *benchmark* dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional jawa timur atau kabupaten terkait indikator ini

**Sasaran Strategi 4** : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.

Indikator keberhasilan Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat yang masuk ke kecamatan Bangsalsari tahun 2023, yaitu:

- pengaduan tentang konflik antar warga sebanyak 3 laporan
- pengaduan pelanggaran trantib kepada 2 laporan
- Pengamanan dan Giat Trantibum sebanyak 22 Kegiatan / laporan

Berdasarkan data pada seksi trantibum, Sebanyak 100% laporan pengaduan terselesaikan sesuai SOP penanganan pengaduan, sehingga Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat. Capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2023 yaitu 100% menunjukkan capaian yang sangat memuaskan.

dari tabel 3.3, apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 sebesar 100 % maka capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Memuaskan ,

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2021 dan 2022 pada tabel 3.2 menunjukkan terdapat kesamaan realisasi dari 100 % Tahun 2022 dan pada tahun 2023 dengan realisasi 100 % .

Dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan / *benchmark* dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional jawa timur atau kabupaten terkait indikator ini.

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari yang Baik								
Nilai SAKIP	101,50%	✓						
Rata rata capaian	101,50%	✓						
Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan								
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	100,09%	✓						
Rata rata capaian	100,09%	✓						
Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan								
Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	✓						
Rata rata capaian	100%	✓						
Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan								

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
ketentraman masyarakat di Kecamatan								
Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	✓						
Rata rata capaian	100%	✓						

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Bangsalsari dalam kategori **Memuaskan.**

**Sasaran Strategis 1 :** Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari yang Baik, dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP telah tercapai dengan kategori Sangat memuaskan

Ada beberapa faktor yang yang masih menjadi permasalahan

1. Pengendalian capaian secara berkala belum dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi SAKIP
2. Dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja aparatur di Kecamatan Bangsalsari
3. adanya permasalahan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektoral.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rencana strategis ke depan, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur melalui rakor internal di kecamatan
2. Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
4. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala

untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.

1. Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian kinerja perangkat daerah dapat kembali meningkat dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

### **Sasaran Strategis 2 :**

Capaian kinerja kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2023 sebesar 100,09% termasuk dalam kategori capaian Sangat Memuaskan.

Berbagai pelayanan yang dilakukan di Kecamatan Bangsalsari, tidak hanya mencakup administrasi kependudukan, dan administrasi lainnya di ruang pelayanan umum, namun perbaikan pelayanan di bidang fasilitasi pemerintahan desa dan fasilitasi kesejahteraan masyarakat dan trantibum mendukung capaian kepuasan masyarakat ini.

Beberapa unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan tersebut adalah:

- Kualitas pelayanan publik wilayah di Kecamatan Bangsalsari belum Optimal diantaranya yaitu petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dan kemampuan petugas dalam pelayanan;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik dalam hal tidak memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, seperti sinyal akses internet lemah dan perangkat Komputer yang kurang memenuhi standar
- Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan capaian target ini, beberapa rencana strategi yang dapat dilakukan adalah:

- Melakukan standarisasi Operasi prosedur dan persyaratan pelayanan publik di Kecamatan Bangsalsari.
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Bangsalsari yang masih belum memadai dengan

menambah jaringan internet dan kuota internet khusus untuk pelayanan dan meng upgrade semua perangkat computer pada tahun 2023 sudah mengadakan 2 unit PC dan di tahun 2024 akan ada pengadaan lagi 1 unit PC untuk Operator KTP, dan untuk kebutuhan Internet pada tahun 2023 sudah tambah 1 set Wifi Icon Net.

- Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
- Melakukan survei kepuasan masyarakat (E Sukma) secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Dengan upaya-upaya tersebut, target 100% kepuasan masyarakat Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2026 diharapkan dapat tercapai.

### **Sasaran Strategis 3 :**

Capaian sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan adalah 100 % masuk kategori Sangat Memuaskan.

Berkaitan dengan keberhasilan Capaian Sasaran Strategis tersebut, dapat disampaikan pula beberapa capaian di wilayah kerja Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2023 diantaranya :

6. Target Kinerja peningkatan status 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Bangsalsari dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri sebanyak 5 (lima) Desa dari 11 (sebelas) Desa ;
7. Peningkatan Status Akreditasi tiga Puskesmas Bangsalsari dan Sukorejo dari Dasar menjadi Status akreditasi Paripurna , status Akreditasi Puskesmas Bangsalsari dari Madya menjadi Status Akreditasi Paripurna;
8. 3 (tiga) Desa dari 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Bangsalsari menjadi Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) pada tahun 2023
9. Pengembangan Desa wisata di Kecamatan Bangsalsari dari 11 (sebelas) Desa ada 6 (enam) Desa yang cukup signifikan dalam pengembangan Desa wisata antara lain :

- a. Desa Baden dengan wisata alam Puncak Badean;
- b. Desa Tugusari dengan wisata alam dan wahana kolam renang Umbul Pelangi;
- c. Desa Sukorejo dengan wisata alam dan UMKM berupa warung – warung makan, kopi dll. Dengan nama wisata Kanal Suko-Suko.
- d. Desa Bangsalsari dengan wisata Swimming Pool Bambu Kuning.
- e. Desa Langkap dengan wisata kolam renang Valerie.
- f. Desa Gambirono dengan wisata Zona Tirta Aquatic Sport.

10. Sentra Industri yang berkembang di wilayah Kecamatan Bangsalsari antara lain :

- a. Industri pembuatan sepatu kulit di Desa Petung;
- b. Industri pembuatan krupuk kuli / rambak di Desa Sukorejo;
- c. Industri pembuatan aksesoris tasbih, gelang, kalung dll dari bahan kayu di Desa Sukorejo;
- d. Industri pembibitan Tanaman Buah buahan, dan tanaman lainnya di Desa Karangsono;
- e. Industri pembibitan Ikan di Desa Karangsono;
- f. Industri pembuatan aksesoris tasbih, gelang, kalung dll dari bahan kayu di Desa Karangsono;

Disamping beberapa keberhasilan tersebut, terdapat beberapa hal yang masih menjadi permasalahan, yaitu Perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2023 mencapai PBB 38,38 % mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2022 perolehan Pajak PBB mencapai 45,23 %; Penurunan perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2023 mencapai PBB 38,38 % disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat wajib pajak yang masih rendah sebagaimana telah terbukti dengan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan mata pencaharian masyarakat hanya sebagai buruh tani yang mana sebagai buruh tani hanya memperoleh pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya, selain itu juga karena kurangnya

pengetahuan wajib pajak akan makna dan tujuan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) itu sendiri. Selanjutnya juga karena faktor lingkungan sosial dan budaya dimana masyarakat wajib pajak dikecamatan Bangsalsari masih terdapat yang ikut-ikutan wajib pajak lainnya yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tersebut. Kemudian juga karena proses pemungutan PBB-P2 itu sendiri yang masih mengalami banyak kendala juga karena kurangnya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak oleh petugas pajak itu sendiri yang mengakibatkan masyarakat wajib pajak di kecamatan kersana masih menyepelkan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Maka dari itu hal ini perlu diperhatikan secara khusus terutama oleh pemerintah untuk menuntaskan faktor-faktor tersebut agar penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat berjalan dengan baik secara maksimal.

Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut tidak lepas adanya sinergi antar stakeholder di Kecamatan Bangsalsari, seperti Koramil dan Babinsa, kader posyandu dan tokoh masyarakat. Sinergi antar stakeholder tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi dan koordinasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya, dan pembentukan jaringan kerja.

Beberapa upaya pencapaian realisasi PBB yang dilaksanakan antara lain adalah program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pajak bagi pembangunan desa. Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses penerimaan pajak dan meningkatkan system pengawasan penerimaan pajak (dengan melakukan Monev setiap triwulan di desa – desa). Dengan adanya sinergi antar stakeholder, diharapkan dapat tercipta program-program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun yang akan datang.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan, Kecamatan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

- Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.

- Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
- Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.

#### **Sasaran Strategis 4 :**

Capaian kinerja Kecamatan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tahun 2023 telah mencapai 100%, yang merupakan hasil yang memuaskan. Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategisnya, seperti pelaksanaan patroli rutin, penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, peningkatan partisipasi pemuda, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

- Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.

- Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Dengan melakukan hal-hal di atas, diharapkan Kecamatan dapat meningkatkan capaian kinerja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### **a. ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2023 didukung 4 (empat) Program 8 (lima) Kegiatan dan 12 (tujuh) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Sasaran Kecamatan Bangsalsari tahun 2023**

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>2.706.694.247</b>	<b>2.500.866.966</b>	<b>92,40</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.350.138.547	2.183.050.022	<b>92,89</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.116.048.547	1.948.994.022	<b>92,11</b>
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.090.000	234.056.000	99,99%
	Input : Jumlah Dana / anggaran			
	Output : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	17 orang	100%
	Outcome : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.785.700	223.621.144	<b>87,08</b>
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Input : Jumlah Dana / Anggaran	256.785.700	223.621.144	87,08%
	Output : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Outcome : Terpenuhinya kegiatan operasional kantor			
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.770.000	94.195.800	<b>94,41</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

	Input : Jumlah Dana / Anggaran	38.500.000	36.312.000	<b>94,32</b>
	Output : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100%
	Outcome : Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dengan baik			
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Input : Jumlah Dana / Anggaran	21.500.000	20.508.800	<b>95,39</b>
	Output : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	100%
	Outcome : Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dengan baik			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Input : Jumlah Dana / Anggaran	39.770.000	37.375.000	<b>93,98</b>
	Output : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
	Outcome : Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara dengan baik			

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1.038.749.800</b>	<b>1.018.315.200</b>	<b>98,03</b>
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.017.116.000	997.107.200	<b>98,03</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Input : Jumlah Dana / Anggaran	1.017.116.000	997.107.200	<b>98,03</b>
	Output : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Outcome : Terselenggaranya Sosialisasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Terbayarnya Honor/Insentif RT/RW Se Kec. Bangsalsari			
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	21.633.800	21.208.000	<b>98,03</b>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Input : Jumlah Dana / Anggaran	21.633.800	21.208.000	<b>98,03</b>
	Output : Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Outcome : Terpenuhinya kegiatan adminduk Kec. Bangsalsari			

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Bangsalsari bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih

#### Rapat Koordinasi

1. Dilaksanakan 15 kali dalam satu Anggaran
2. Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi
3. Peserta Kegiatan, Muspika, Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Instansi Lintas Sektoral, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama.



Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kantor Kecamatan Bangsalsari bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, sehingga dapat mencapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (pelum).



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target	Capaian	%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>37.775.000</b>	<b>33.024.000</b>	<b>87,42</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.375.000	9.984.000	<b>69,45</b>
	Jumlah Dana / Anggaran			
	Input : Pelaksanaan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.375.000	7.084.000	<b>84,59</b>
	Output : Terlaksananya kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80%	80%	100%

	Outcome : Terpenuhinya kegiatan Musrenbangdes Se Kec. Bangsalsari			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Input : Jumlah Dana / Anggaran	6.000.000	2.900.000	<b>48,33</b>
	Output : Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Outcome : Terpenuhinya kegiatan sosialisasi dan pembagian makanan tambahan balita			
	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	23.400.000	23.040.000	<b>98,46</b>
	- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			
	Input : Jumlah Dana / Anggaran	23.400.000	23.040.000	<b>98,46</b>
	Output : Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 Keluarga	36 Keluarga	100%
	Outcome : Terpenuhinya kegiatan sosialisasi dan pembagian makanan tambahan balita			

Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa bertujuan untuk

mengintegrasikan secara langsung keinginan dan kebutuhan masyarakat desa ke dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang selaras dengan potensi sumber daya lokal. Sub kegiatan ini melibatkan pemerintah desa, dewan penasihat desa, dan warga setempat sebagai peserta Musrenbangdes. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat desa dalam pembangunan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan Desa.

Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa meliputi beberapa tahapan : Persiapan musrenbangdes, penyiapan dokumen, serta penentuan waktu dan tempat musrenbangdes, Evaluasi dan laporan Murenbangdes ( Meliputi evaluasi proses dan hasil musrenbangdes, penyusunan laporan musrenbangdes, dan penyampaian laporan musrenbangdes).



Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan desa di wilayah kecamatan Bangsalsari. Sub kegiatan ini melibatkan camat sebagai koordinator yang melakukan sinkronisasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan desa diantaranya dengan melaksanakan Pembinaan Pengurus Karang Taruna, Pembinaan Puskesmas, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Bagi Pk-R /Fad, Sosialisasi Pencegahan Pms/Ima Dalam Rangka Penurunan AKI/AKB



Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>337.970.000</b>	<b>329.560.960</b>	<b>97,51</b>
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	337.970.000	329.560.960	<b>97,51</b>
	- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Input : Jumlah Dana / Anggaran	337.970.000	329.560.960	<b>97,51</b>
	Output : Terlaksananya kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13 Laporan	13 Laporan	100%
	Outcome : Terpenuhinya kegiatan Trantibum dan terbayarnya Honorarium Banpol PP Kec. Bangsalsari			
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.121.189.047</b>	<b>3.881.767.126</b>	<b>94,19</b>

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pembinaan Linmas Se-wilayah Kecamatan Bangsalsari Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Kecamatan Bangsalsari

menyelenggarakan kegiatan Pembinaan untuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di wilayah Kecamatan Bangsalsari, bertempat di Aula Wisnu Graha Kantor Kecamatan Bangsalsari. Kegiatan Pembinaan Linmas ini diikuti oleh perwakilan Linmas dari desa-desa se-Kecamatan Bangsalsari DAN Sub kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih



Patroli ke Wilayah Kecamatan Bangsalsari dan Pemantauan NATARU Bersama 3 Pilar



Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam membuat peraturan desa (Perdes) dan peraturan kepala desa (Perkades) yang sesuai dengan kaidah hukum dan teknik penyusunan. Sub kegiatan ini

melibatkan camat sebagai fasilitator yang melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap proses penyusunan Perdes dan Perkades. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Perdes dan Perkades yang menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa

Jenis Kegiatan : Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES).

1. Dilaksanakan 1 kali dalam satu Anggaran
2. Bentuk kegiatan :
  1. Pelatihan/Bimbingan Teknis penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES).
  2. Peserta Kegiatan, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, Operator Desa dan Kasi Kesra sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) dari Desa-desa se Kecamatan Bangsalsari
  3. Materi pelatihan,
    - Tata cara pelaksanaan, penyusunan dan pelaporan RKP Desa
    - Tata cara pelaksanaan, mekanisme, penyusunan dan penetapan APB Desa
    - Teknis Pembuatan RAB

Out Put kegiatan :

- a. peserta mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tahapan penyusunan RKP Desa
- b. peserta mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tahapan penyusunan dan penetapan APB Desa Tepat waktu



Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan aset desa sesuai dengan kaidah hukum dan teknik pengelolaan. Sub kegiatan ini melibatkan camat sebagai fasilitator yang melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan desa yang baik, tertib, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang profesional, responsif, dan akuntabel di tingkat desa.

Sub kegiatan ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

Jenis Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi penggunaan DD, ADD BGH.

1. Dilaksanakan di tujuh Desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari yakni Desa Pontang, Andongsari, Sabrang, Sumberejo, Tegalsari, Bangsalsari dan Karanganyar
2. Bentuk kegiatan :
  - a. Pembinaan Administrasi keuangan desa, monitoring penyusunan Surat pertanggungjawaban (SPJ) setiap tahapan pencairan DD, ADD dan BGH P/R.
  - b. Pengecekan lokasi pelaksanaan pembangunan fisik
3. Dilaksanakan 3 kali dalam setahun
4. Out Put kegiatan : dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi



## **b. ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bangsalsari adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>N O</b>	<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
1	Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari yang Baik	101,50	92,40	Efisien
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	100,09	98,03	Efisien
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100%	87,42%	Efisien
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	100%	97,51%	Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Bangsalsari berjumlah 16 orang dengan rincian 8 orang pejabat struktural dan 8 orang pejabat pelaksana. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi terbagi menjadi 4 sasaran yaitu

Sasaran 1 Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan

Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 2.706.694.247 ,- dan terserap sebesar Rp. 2.500.866.966,-

Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan dalam Program urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 1.038.749.800,- dan terserap sebesar Rp. 1.018.315.200,-;

Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 37.775.000,- dan terserap sebesar Rp. 33.024.000,-;

Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan dalam Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 337.970.000,- dan terserap sebesar Rp. 329.560.960,-,

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Bangsalsari dengan rata- rata capaian Kinerja 93,84%.

Selain efisiensi yang berhasil dilaksanakan, dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2023, dilakukan refocusing anggaran , yaitu pergeseran anggaran kepada program/ kegiatan prioritas , pada P-APBD TH 2023 untuk:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd Sebesar Rp. 243.294.000 di Hold / ditarik ke Kas Daerah untuk digunakan pada program/ kegiatan prioritas Kabupaten Jember Sebesar Rp. 9.854.000
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sebesar Rp. 281.011.200 di Hold / ditarik ke Kas Daerah untuk digunakan pada program/ kegiatan prioritas Kabupaten Jember Sebesar Rp. 34.760.000
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sebesar Rp. 39.839.800 di Hold / ditarik ke Kas Daerah untuk digunakan

- pada program/ kegiatan prioritas Kabupaten Jember Sebesar Rp. 1.339.800
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Sebesar Rp. 27.208.600 di Hold / ditarik ke Kas Daerah untuk digunakan pada program/ kegiatan prioritas Kabupaten Jember Sebesar Rp. 5.708.600
  - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Sebesar Rp. 47.590.000 di Hold / ditarik ke Kas Daerah untuk digunakan pada program/ kegiatan prioritas Kabupaten Jember Sebesar Rp. 7.820.000
  - f. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sebesar Rp. 452.233.200 di Hold / ditarik ke Kas Daerah untuk digunakan pada program/ kegiatan prioritas Kabupaten Jember Sebesar Rp. 436.222.400
  - g. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebesar Rp. 336.320.000 di Hold / ditarik ke Kas Daerah untuk digunakan pada program/ kegiatan prioritas Kabupaten Jember Sebesar Rp. 4.400.000

Total anggaran Kecamatan Bangsalsari yang Hold / ditarik ke Kas Daerah untuk digunakan pada program/ kegiatan prioritas Kabupaten Jember adalah sebesar : Rp. 500.104.800

## **5. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bangsalsari pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 4.121.189.047, Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 4.042.513.947
2. Belanja Modal sebesar Rp. 78.675.100

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 (Empat) program dan 8 (Delapan) kegiatan Kecamatan Bangsalsari dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.706.694.247</b>	<b>2.500.866.966</b>	<b>92,40</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.350.138.547	2.183.050.022	<b>92,89</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.116.048.547	1.948.994.022	<b>92,11</b>
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.090.000	234.056.000	<b>99,99</b>
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.785.700	223.621.144	<b>87,08</b>
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.785.700	223.621.144	<b>87,08</b>
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.770.000	94.195.800	<b>94,41</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.500.000	36.312.000	<b>94,32</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.500.000	20.508.800	<b>95,39</b>
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.770.000	37.375.000	<b>93,98</b>

<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1.038.749.800</b>	<b>1.018.315.200</b>	<b>98,03</b>
4	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.017.116.000	997.107.200	<b>98,03</b>
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.017.116.000	997.107.200	<b>98,03</b>
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	21.633.800	21.208.000	<b>98,03</b>
	- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.633.800	21.208.000	<b>98,03</b>
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>37.775.000</b>	<b>33.024.000</b>	<b>87,42</b>
6	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.375.000	9.984.000	<b>69,45</b>
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.375.000	7.084.000	<b>84,59</b>
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.000.000	2.900.000	<b>48,33</b>
7	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	23.400.000	23.040.000	<b>98,46</b>
	- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	23.400.000	23.040.000	<b>98,46</b>
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>337.970.000</b>	<b>329.560.960</b>	<b>97,51</b>

8	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	337.970.000	329.560.960	<b>97,51</b>
	- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	337.970.000	329.560.960	<b>97,51</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.121.189.047</b>	<b>3.881.767.126</b>	<b>94,19</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.881.767.126,00 dari total anggaran Rp. 4.121.189.047,00 atau 94.19%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar 0,13% yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 3.829.950.425,00 terealisasi sebesar Rp 3.602.405.695,00,- atau 94,06%. kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya belanja Gaji Pagunya besar dan efisensi Anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bangsalsari merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Bangsalsari. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Bangsalsari 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Bangsalsari pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Bangsalsari dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan memuaskan karena dari 4 (empat) indikator sasaran sebanyak 4 (empat) indikator pencapaiannya dalam kategori Memuaskan.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 3.881.767.126,00 (94,19 %), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan (tidak ada) efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

### **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bangsalsari masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. terdapat kendala atau hambatan dalam implementasi program dan kegiatan akibat perubahan regulasi dan kebijakan.
2. adanya permasalahan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sectoral
3. Kualitas pelayanan publik wilayah di Kecamatan Bangsalsari belum Optimal diantaranya yaitu petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dan kemampuan petugas dalam pelayanan;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik dalam hal tidak memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, seperti sinyal akses internet lemah dan perangkat Komputer yang kurang memenuhi standar
5. Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
6. Target Kinerja peningkatan status 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Bangsalsari dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri sebanyak 5 (lima) Desa dari 11 (sebelas) Desa ;
7. Peningkatan Status Akreditasi tiga Puskesmas Bangsalsari dan Sukorejo dari Dasar menjadi Status akreditasi Paripurna , status Akreditasi Puskesmas Bangsalsari dari Madya menjadi Status Akreditasi Paripurna;
8. 3 (tiga) Desa dari 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Bangsalsari menjadi Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) pada tahun 2023
9. Perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2023 mencapai PBB 38,38 % mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2022 perolehan Pajak PBB mencapai 45,23 % ;

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.

2. Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
4. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
5. Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Melakukan standarisasi Operasi prosedur dan persyaratan pelayanan publik di Kecamatan Bangsalsari.
7. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Bangsalsari yang masih belum memadai dengan menambah jaringan internet dan kuota internet khusus untuk pelayanan dan meng upgrade semua perangkat computer pada tahun 2023 sudah mengadakan 2 unit PC dan di tahun 2024 akan ada pengadaan lagi 1 unit PC untuk Operator KTP, dan untuk kebutuhan Internet pada tahun 2023 sudah tambah 1 set Wifi Icon Net.
8. Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.
9. Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
10. Melakukan survei kepuasan masyarakat (E Sukma) secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki kualitas pelayanan.
11. Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
12. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
13. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi

program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.

14. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
15. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis. Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
16. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
17. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
18. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
19. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.
20. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat..

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.


## RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGSALSARI

### Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD				B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	BB (75)	.			
			1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	Pengikutan bimtek dan diklat sesuai tusi masing-masing ASN serta pembinaan di bidang kepegawaian secara berkala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	2				4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok			

	daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	dan Tata Laksana Pemerintah Daerah											
			3 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		80 (Nilai IKM)	85 (Nilai IKM)	85 (Nilai IKM)	90 (Nilai IKM)	90 (Nilai IKM)	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi..	Memberikan pelayanan secara prima dengan lebih humanis dan meningkatkan sarpras pelayanan, mempercepat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan memberikan purna layan dengan baik.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan		80%	80%	80%	85%	85%	Fasilitasi Peningkatan Usaha	Fasilitasi Pemberian pelatihan UMK dengan	Program Pemberdayaan Masyarakat

			Masyarakat di Kecamatan	masyarakat yang dilaksanakan							Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa	memperhatikan produk unggulan masyarakat desa, hingga pemasarannya	t Desa Dan Kelurahan
			Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat		80%	85%	85%	90%	90%	Penegakan Perda dan Perbup atau peraturan perundangan lainnya.	Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Jember, Januari 2023  
 CAMAT BANGSALSARI  
  
 Drs. BASUKIK  
 NIP. 196706241988031002



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN BANGSALSARI

Jl. Achmad Yani Nomor 48 Telp. (0331) 7114418 Bangsalsari 68154

## PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BASUKIK  
Jabatan : Camat Bangsalsari

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.  
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

**CAMAT BANGSALSARI,**

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**  
  
**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.**

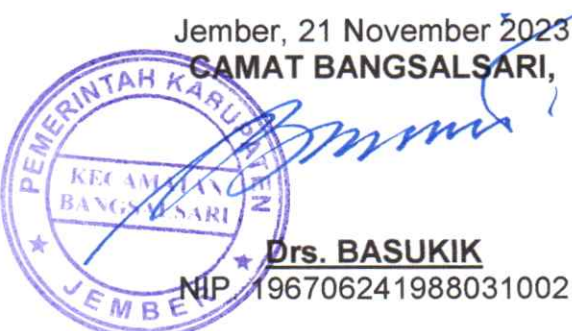
  
**Drs. BASUKIK**  
NIP. 196706241988031002

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**KECAMATAN BANGSALSARI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bangsalsari	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ktertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Ma-syarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Me-rata dan Berku-alitas di Keca-matan Bangsalsari	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Bangsalsari	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	100%
4	Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari yang Baik	Nilai SAKIP	B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.706.694.247	P – APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.038.749.800	P – APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 37.775.000	P – APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 337.970.000	P – APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.121.189.047</b>	

**BUPATI JEMBER,**  
  
**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.**

Jember, 21 November 2023  
**CAMAT BANGSALSARI,**  
  
**Drs. BASUKIK**  
NIP. 196706241988031002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN BANGSALSARI**

JL. ACHMAD YANI NO. 48 ☎ (0331) 711418 JEMBER 68154

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2023**

**RPJMD**

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

**RKT**

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja	Nilai SAKIP	B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase realisasi anggaran	85%				

profesional, efektif, dan efisien.		Perangkat Daerah									
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	12 Laporan	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 org/bln	2.116.048.547
								Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	14 Dokumen	234.090.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	256.785.700

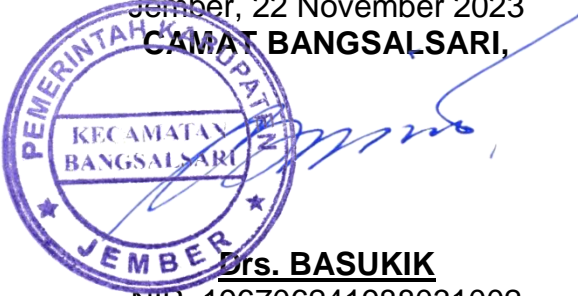
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	38.500.000
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	21.500.000

								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	39.770.000
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Nilai IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	85%				
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 %	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dok	1.017.116.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Urusan	90%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	21.633.800

					han yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kepada Masyarakat di Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	80%				
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	80%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lemb. /Desa	8.375.000
								Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	6.000.000

								di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Kecamatan yang dibina/diberdayakan	80%	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	36 Keluarga	23.400.000
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	85%	Program Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	85%				
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan	Cakupan Penerapan dan Penegakan	85%	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	13 Laporan	337.970.000

					Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Daerah		yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
--	--	--	--	--	--	------------------	--	---	--	--	--

Jember, 22 November 2023  
**CAMAT BANGSALSARI,**  
  
**Drs. BASUKIK**  
 NIP. 196706241988031002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN BANGSALSARI**

JL. ACHMAD YANI NO. 48 ☎ (0331) 711418 JEMBER 68154

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023**

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	Tw 1: 4 Tw 2: 6 Tw 3: 6 Tw 4: 4	
				Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	Tw 1: 2 Tw 2: 5 Tw 3: 3 Tw 4: 4	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	Tw 1: 3 Tw 2: 3 Tw 3: 3 Tw 4: 3	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Unit	Tw 1: - Tw 2: 1 Tw 3: - Tw 4: -	

				Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan pajaknya			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Tw 1: - Tw 2: 1 Tw 3: - Tw 4: -	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	Tw 1: - Tw 2: - Tw 3: 1 Tw 4: -	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tw 1: 25 Tw 2: 25 Tw 3: 25 Tw 4: 12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Orang / Kali	Tw 1: 3 Tw 2: 3 Tw 3: 3 Tw 4: 3	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Laporan	Tw 1: 3 Tw 2: 3 Tw 3: 3 Tw 4: 3	

			oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan			
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Tw 1: 20% Tw 2: 20% Tw 3 : 20% Tw 4: 20%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemb/ Desa	Tw 1: 2 Tw 2: 3 Tw 3: 3 Tw 4: 3	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	Tw 1: 3 Tw 2: 3 Tw 3: 3 Tw 4: 3	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Laporan	Tw 1: 9 Tw 2: 9 Tw 3: 9 Tw 4: 9	

					Berkualitas dan Berdaya Saing			
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	85%	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum					
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Tw 1: 2 Tw 2: 4 Tw 3: 3 Tw 4: 4	

Jember, 22 November 2023

**CAMAT BANGSALSARI,**



**Drs. BASUKIK**

NIP. 196706241988031002



**KEPUTUSAN CAMAT BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/10/35.09.09/2023**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Bangsalsari ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

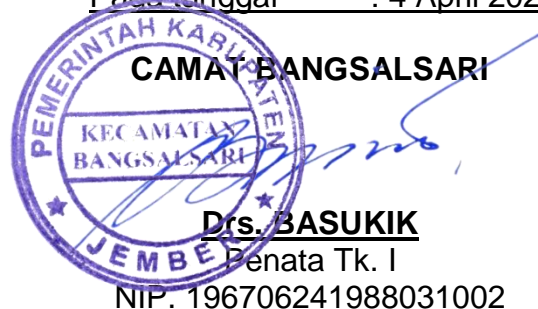
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Bangsalsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 4 April 2023

  
**CAMAT BANGSALSARI**  
**Drs. BASUKIK**  
Penata Tk. I  
NIP. 196706241988031002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

- Instansi** : Kecamatan Bangsalsari
- Tugas** :
- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
  - h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
  - i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan:
- Fungsi** :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasionserta pengembangan kehidupan demokrasi;
  - b. penanganan konflik sosial;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instanpemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
  - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaanpembangunan diwilayah kecamatan;
  - e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
  - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari

**Indikator Tujuan** : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KECAMATAN BANGSALSARI**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{—————}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Sekcam	LAKIP

Jember, 4 April 2023



**CAMAT BANGSALSARI**

**Dis. BASUKIK**

Penata Tk. I

NIP. 196706241988031002

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021-2026, yaitu:

- **NON RUTIN**

- **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- **Sasaran**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- **RUTIN :**

- **Tujuan**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

- **Sasaran**

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah